

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK
BUAH KAPAL (ABK) PADA PT. KALWEDO KIDABELA
MALUKU TENGGARA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-
UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG
KETENAGAKERJAAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Akhir Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)**



Disusun Oleh

ADOLFINA LILY WATRATAN

201441002

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
M A L A N G
2018**

Persetujuan Skripsi

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK BUAH
KAPAL (ABK) PADA PT. KALWEDO KIDABELA MALUKU
TENGGARA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

Diajukan oleh

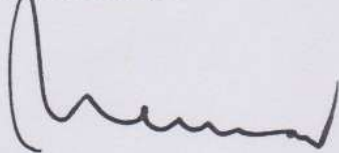
Adolfina Lily Watratan

201441002

Telah disetujui Dosen Pembimbing

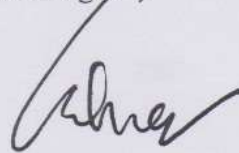
Malang, 26 Juni 2018

Pembimbing I



Hermanto Silalahi, S.H.,M.Hum
NIK.198707110007

Pembimbing II



Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum
NIK. 200409210042

Mengetahui

Dekan,



Dr. Celina Tri Siwi K.,S.H.,M.Hum
NIK.198707110007

Menyetujui

Ka. Bid. Ilmu Hukum



Hermanto Silalahi, S.H.,M.Hum
NIK.200409210042

Pengesahan Skripsi

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

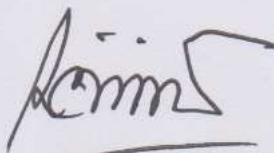
Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang

Pada 29, Juni 2018

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua



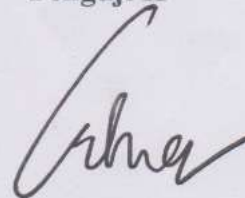
Dr. R. Diah Imaningrum, S.H.,M.Hum.
NIK. 199105210020

Penguji I



Hermanto Silalahi, S.H.,M.Hum.
NIK. 198707110007

Penguji II



Dr. Celina Tri Siwi K, S.H.,M.Hum.
NIK. 200409210042

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Unika Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K, S.H.,M.Hum.
NIK. 200409210042

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ADOLFINA LILY WATRATAN

NIM : 201441002

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, judul dari Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 29, Juni 2018

Yang menyatakan



ADOLFINA LILY WATRATAN

Daftar Riwayat Hidup

DATA PRIBADI

Nama : Adolfina Lily Watratan
Nim : 201441002
Alamat : Jalan. Kampung Bugis. RT O2,
Kecamatan Tanimbar Utara,
Kabupaten Maluku Tenggara Barat,
Provinsi Maluku
Tlp/Hp : 085330149517
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Katolik
Nama Orang Tua (Ayah) : Agustinus Watratan
Nama Orang Tua (Ibu) : Antina Watratan
Kewarganegaraan : Indonesia

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2002-2008 : SD Naskat Santo Yoseph Lamdesar Timur
2008-2011 : SMP Kristen 2 Tanimbar Utara
2011-2014 : SMA Cor Jesu Larat
2014-2018 : Universitas Katolik Widya Karya (Malang)

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan anugerahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK BUAH KAPAL (ABK) PADA PT. KALWEDO KIDABELA MALUKU TENGGARA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademis yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widya Karya Malang guna memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak serta arahan dari dosen pembimbing dan semangat dari teman-teman. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria atas berkat perlindungan-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Ibu Dr. Celina Tri Siwi K, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Karya Malang dan sebagai dosen pembimbing II skripsi ini yang telah sabar menghadapi, menuntun dan mengoreksi skripsi ini dan selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penulisan skripsi hingga selesai.
3. Bapak Hermanto Silalahi, S.H.,M.Hum selaku Kepala Bidang Ilmu Hukum Universitas Widya Karya Malang dan sebagai dosen pembimbing I yang telah sabar membimbing penulis dan memberikan saran dan masukan terkait penulisan skripsi.
4. Ibu Dr. R. Diah Imaningrum S.H.,M.Hum selaku Ketua Penguji yang sudah memberi masukan atas penulisan skripsi ini.

5. Bapak Paulus A. Sabono, AP selaku Direktur Utama PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian dan juga telah bersedia untuk menjawab semua pertanyaan penulis saat wawancara terkait penulisan skripsi ini.
6. Bapak Marselinus Fenanlampir selaku mantan anak buah kapal yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian hingga selesai.
7. Bapa, mama`ku serta kakak`ku dan adik-adik`ku (Eng, Fani, Koko dan Chun) atas segala jerih payah, kasih sayang, doa dan dukungan-Nya setiap hari kepada penulis.
8. Mama tenga`ku Redemta di Belanda dan Bu Rudi di Biak yang selalu memberi doa dan dukukan lewat telpon kepada penulis selama penulisan skripsi.
9. Sahabat saya Cintya Dinda yang selalu memberikan motivasi dan masukan bagi penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Widya Karya Malang angkatan 2014 (Cintya, Kadavi, Kukun, Adi, Louis, Agus dan Cristoper) yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi.
11. Teman-teman kelompok 7 KKN angkatan 2017 (Regi, Klaudia, Tita, Karin, Putri, Maikel, Nunu, Inosen, Stefani, Soge, dan josua) yang selalu mengingatkan untuk mengerjakan skripsi dan selalu memberi semangat.
12. Bagi anak-anak Kost Wister (Ina, Nita, Novi, Lusi, Kristin, Iren, Keti, Ketrin, Moni, Tiara, dan Fira) yang memberi dukungan serta semangat dalam penulisan skripsi ini.

Malang, 25 Juni 2018



Adolfina Lily Watratan

ABSTRAK

NAMA : ADOLFINA LILY WATRATAN
NIM : 201441002
JUDUL PENELITIAN HUKUM : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK BUAH KAPAL (ABK) PADA PT. KALWEDO KIDABELA MALUKU TENGGARA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**
KATA KUNCI : Perlindungan Hukum, Hak-Hak Anak Buah Kapal.

RINGKASAN

Penelitian ini, bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat tidak terpenuhi, serta mengetahui upaya yang dilakukan anak buah kapal untuk menuntut perlindungan hukum atas hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian metode *yuridis empiris*. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada mantan anak buah kapal dan direktur utama PT.Kalwedo Kidabela serta observasi terhadap perjanjian kerja laut. Data sekunder diperoleh dari dari studi kepustakaan yaitu perundang-undangan dan buku-buku tentang ketenagakerjaan.

Dari hasil penelitian di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, masih kurang dalam memenuhi hak-hak anak buah kapal (ABK) yakni hanya memberikan upah sesuai jabatan, fasilitas makan dan tempat tidur di kapal, kesehatan, kecelakaan kerja di dalam perjanjian kerja laut. Faktor penyebab tidak terpenuhinya hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat dari segi perjanjian kerja dan undang-undang. Dari segi perjanjian ada beberapa hal diantaranya tidak adanya subsidi dari pemerintah pusat, harga tiket yang murah, rute kurus (kapasitas pada penumpang sangat sedikit), dan harga bahan bakar yang naik,. Segi undang-undang kurangnya pemahaman anak buah kapal terhadap hak-hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan minimnya anggaran dana untuk memenuhi kebutuhan hak-hak pekerja. Upaya yang dilakukan anak buah kapal yaitu upaya bipartit untuk bernegosiasi dengan pihak perusahaan, namun tidak merespon akan hal itu sehingga negosiasi yang dilakukan telah gagal sesuai pasal 3 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan tidak adanya risalah sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap tripartit. Tahun penulisan skripsi : 2018

ABSTRACT

NAME : ADOLFINA LILY WATRATAN
NIM : 201441002
TITLE OF LEGAL RESEARCH : **LEGAL PROTECTION ON THE
RIGHTS OF THE CREW IN
PT. KALWEDO-KIDABELA WEST
MALUKU TENGGARA
REVIEWED FROM THE NUMBER
13 YEAR 2003 ON EMPLOYMENT**
KEY WORDS : Legal Protection, Rights Of The Crew

SUMMARY

This study aims to determine the fulfillment of the rights of crew members at PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, and to know the factors that cause the rights of crew members at PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat is unfulfilled, as well as knowing the efforts of the crew to demand legal protection of unfilled labor rights. The type of research used is the research type of empirical juridical method. Primary data were obtained from interviews with former crew and chief executive officer of PT.Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat as well as observation of sea work agreement. Secondary data is obtained from the literature study of legislation and books on employment.

From the results of research at PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, still lacking in fulfilling the rights of crew (ABK) which only provide wages according to position, dining facilities and bed on board, health, work accident in marine working agreement. Factors that do not fulfill the rights of crew members at PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat in terms of work agreement and law. In terms of agreement there are several things including the absence of subsidies from the central government, cheap ticket prices, thin routes (capacity on very few passengers), and rising fuel prices. Legislation lacks understanding of crew on workers' rights regulated in legislation and lack of budgetary funds to meet workers' rights needs. The efforts of the crew are bipartite efforts to negotiate with the company, but do not respond to it so that negotiations have failed in accordance with Article 3 paragraph (3) of Law no. 2 of 2004 on Industrial Relations Completion and the absence of a treatise so that it can not proceed to the tripartite phase.

Year of thesis writing: 2018

DAFTAR ISI

Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahaan	iii
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	iv
Daftar Riwayat Hidup	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tinjauan Penelitian.....	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
1.5. Metodologi Penelitian.....	8
1.5.1. Jenis Penelitian.....	8
1.5.2. Lokasi Penelitian.....	8
1.5.3. Sumber Data.....	9

1.5.3.1. Data Primer.....	9
1.5.3.2. Data Sekunder.....	9
1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.....	9
1.5.5. Analisis Data.....	10
1.6. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	12
2.2. Pengertian Pekerja dan Anak Buah Kapal.....	14
2.2.3. Hak-hak Pekerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	14
2.2.2. Hak-hak Anak Buah Kapal (ABK).....	15
2.3. Pemberi Kerja/Pengusaha.....	16
2.3.1. Kewajiban Pemberi Kerja/Pengusaha.....	17
2.4. Perjanjian Kerja.....	18
2.4.1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).....	21
2.4.2. Perjanjian Kerja Laut.....	23
2.5. Cara Penyelesaian Sengketa Perburuhan.....	24
2.5.1. Bipartit.....	24
2.5.1. Tripartit.....	25
2.5.1.1. Mediasi.....	25

2.5.1.2. Konsiliasi.....	27
2.5.1.3. Arbitrase.....	27
2.5.1.4. Pengadilan Hubungan Industrial.....	29
2.6. Penelitian Terdahulu.....	30
2.7. Tinjauan Teori.....	33
2.7.1. Teori Keadilan.....	33
2.7.2. Teori Kepastian Hukum.....	35
2.7.3. Teori Perlindungan Hukum.....	36
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.1. Pemenuhan Hak-Hak Anak Buah Kapal	
di PT. Kalwedo Kidabela.....	39
3.1.1. Gambaran Umum PT. Kalwedo Kidabela.....	39
3.1.2. Struktur Organisasi PT. Kalwedo Kidabela.....	40
3.1.3. Hak-Hak Anak Buah Kapal yang Diberikan oleh PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat dalam Perjanjian Kerja Laut.....	42
3.1.4. Analisis Pemenuhan Hak-Hak Anak Buah Kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat dengan Teori Perlindungan Hukum.....	47
3.2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Hak-Hak Anak Buah Kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat	

tidak Terpenuhi.....	51
3.2.1. Faktor tidak Terpenuhi Hak-Hak Anak Buah Kapal sesuai dalam Perjanjian Kerja Laut.....	51
3.2.2. Faktor tidak Terpenuhi Hak-Hak Anak Buah Kapal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	53
3.2.2.1. Kurangnya pemahaman anak buah kapal terhadap hak-hak pekerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.....	53
3.2.2.2. Minimnya anggaran dana untuk memenuhi kebutuhan hak-hak anak buah kapal.....	54
3.2.3. Analisis Fakor-Faktor yang Menyebabkan Hak-Hak Anak Buah Kapal di PT. Kalwedo Kidabela tidak Terpenuhi Dikaitkan dengan Teori Keadilan.....	55
3.3. Upaya yang Dilakukan Anak Buah Kapal untuk Menuntut Perlindungan Hukum atas Hak-Hak yang tidak Terpenuhi.....	57
3.3.1. Upaya Bipartit yang Dilakukan Anak Buah Kapal dengan Perusahaan.....	57
3.3.2. Kendala yang Dihadapi Anak Buah Kapal (ABK) dalam Upaya Penuntutan Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Anak Buah Kapal.....	59

3.3.2.1. Asumsi Anak Buah Kapal.....	59
3.3.2.2. Tidak adanya serikat pekerja/serikat buruh (SB).....	60
3.3.2.3. Tidak adanya biaya untuk berperkara.....	60
3.3.3. Analisi Upaya yang Dilakukan Anak Buah Kapal untuk Menuntut Perlindungan Hukum atas Hak-Hak yang tidak Terpenuhi dengan Teori Kepastian Hukum.....	61
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	64
4.2. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
Lampiran	
Surat Keterangan Penelitian	
Perjanjian Kerja Laut	
Kartu Kendali	
Dokumentasi saat penelitian	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Bekerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan setiap orang untuk dapat mempertahankan hidupnya, mengingat dalam kehidupan manusia selalu adanya kebutuhan yang melekat dalam diri setiap orang. Saat bekerja, orang yang melakukan pekerjaan tersebut tentu akan mendapatkan uang sehingga uang yang dihasilkan dari bekerja dapat memenuhi kebutuhan hidup dan dapat hidup secara layak. Sesuai pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Untuk bekerja dibutuhkan adanya lapangan pekerjaan, Indonesia sendiri ada beraneka ragam lapangan pekerjaan yang tersedia salah satunya lapangan pekerjaan di sektor laut khususnya di transportasi laut dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dan sebagian wilayahnya merupakan perairan, sehingga pekerjaan di sektor perairan laut cukup banyak. Transportasi laut merupakan sarana yang sangat dibutuhkan masyarakat Indonesia khususnya daerah-daerah kepulauan guna dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dalam hal bepergian untuk melakukan suatu aktivitas dari satu tempat ke tempat lainnya.

Salah satu bagian dari Indonesia yang berbentuk kepulauan adalah provinsi Maluku. Provinsi Maluku memiliki 12 kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten

Maluku Tenggara Barat (MTB). Kabupaten ini merupakan daerah kepulauan yang memiliki luas 52.995,20 km² yang terdiri dari wilayah daratan seluas 10.102,92 km² (19,06%) dan wilayah perairan seluas +_42.892,28 km² (80,94%). Sebagai daerah kepulauan, kabupaten Maluku Tenggara Barat terdiri dari 113 pulau.¹Melihat banyaknya pulau-pulau di kabupaten ini, tidaklah mungkin untuk menuju dari pulau satu ke pulau yang lain dengan menggunakan transportasi darat, sehingga transportasi alternatif yang cocok dengan keadaan geografis tersebut adalah dengan menggunakan transportasi laut. Hal itulah yang membuat kabupaten ini memiliki banyak transportasi laut khusus kapal pengangkut penumpang yang disediakan oleh pemerintah setempat, guna memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

Transportasi laut dengan menggunakan kapal laut tentu ada pihak-pihak didalamnya yang mengurus, baik itu tentang permodalan transportasi dan pihak-pihak yang mengurus berjalannya kapal. Para pihak ini terdiri dari pihak perusahaan selaku pemberi kerja dan anak buah kapal selaku pekerja yang bekerja pada perusahaan. Anak buah kapal adalah orang yang bekerja diatas kapal sesuai jabatannya. Pengusaha/pengelola kapal bisa dimiliki oleh perseorangan, badan usaha maupun badan hukum. Pengelola usaha yang dimiliki oleh badan usaha bisa dipegang oleh pihak swasta maupun pihak pemerintah baik itu BUMN maupun BUMD.

Anak buah kapal merupakan pihak yang lemah dibandingkan dengan pemberi kerja/perusahaan. Hal itu dikarenakan pihak perusahaan/pemberi kerja tersebut

¹ Admin, "Maluku" diakses dari <http://www.malukuprov.go.id> pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 17.05

memiliki kuasa terhadap anak buah kapal, selaku pekerja yang bekerja dibawah perintahnya. Untuk itu anak buah kapal sangat membutuhkan suatu perlindungan hukum khususnya terkait hak-hak anak buah kapal. Hak-hak anak buah kapal selaku pekerja pada umumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan hal ini yang menjadi suatu pegangan bagi pekerja maupun pemberi kerja/perusahaan dalam menjalankan hak serta kewajibannya.

Pihak pengelola kapal di Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) adalah Badan usaha milik daerah (BUMD) yang dinamakan PT.Kalwedo Kidabela yang mana diatur dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Daerah Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2012 tentang PT. Kalwedo Kidabela, menyatakan bahwa Perseroan Terbetas (PT). Kalwedo Kidabela adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. PT. Kalwedo Kidabela berlokasi di Saumlaki, perusahaan ini bergerak diberbagai bidang usaha salah satunya dibidang usaha pelayaran yakni transportasi laut, yang memiliki 2 buah kapal dan mempekerjakan pekerja sebanyak 37 orang sebagai anak buah kapal. 18 orang bekerja pada Kapal Motor Penumpang Egron (KMP.EGRON) dan 19 orang lainnya bekerja pada Kapal Motor Penumpang Sardinela (KMP.SARDINELA).

Dalam hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di PT. Kalwendo Kidabela Maluku Tenggara Barat, memiliki hak dan kewajiban yang disepakati bersama serta dituangkan dalam suatu perjanjian kerja laut (PKL). Menurut pasal 1 ayat (5) PP Nomor 7 tahun 2000 tentang Kepelautan menjelaskan bahwa Perjanjian kerja laut adalah perjanjian kerja perorangan yang ditanda tangani oleh pelaut Indonesia dengan

pengusaha angkutan di perairan. Walaupun dalam suatu perjanjian kerja laut sudah memuat hak dan kewajiban dari anak buah kapal dan pihak pengelola kapal, tidak bisa dipungkiri bahwa semua yang ada pada perjanjian kerja yang sudah dikehendaki bersama dapat berjalan dengan baik. Terkadang ada saja hal-hal yang membuat suatu perjanjian kerja tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang telah disepakati.

Seperti yang terjadi pada anak buah kapal yang bekerja pada Kapal Motor Penumpang (KMP) Feri Egron dan Kapal Motor Penumpang (KMP) Feri Sardinela yang berada dibawah kepemilikan PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat. Pada tahun 2014 para pekerja ini hak utamanya tidak diberikan yaitu tidak dibayarkannya upah/gaji pekerja selama satu tahun penuh. Gaji yang tidak terbayarkan bervariasi, ada yang belum dibayarkan selama 10 bulan, 12 bulan, dan 13 bulan. Jumlah awak kapal yang tidak diberikan upah yaitu semua awak kapal yang bekerja pada kapal feri sardinela dan kapal feri egron yang dikelola oleh PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat. Berikut jumlah pekerja yang bekerja di kapal feri egron dan sardinela yakni:

1. Data Pekerja Kapal Motor Penumpang Egron (KMP. Egron).

No	Jenis pekerja	Jumlah
1	Nahkoda	1 orang
2	Mualim	2 orang
3	Serang (kepala kerja)	1 orang
4	Juru mudi	3 orang
5	Kelasi	2 orang
6	Kepala kamar mesin (KKM)	1 orang
7	Masinis	2 orang
8	Mandor mesin	1 orang
9	Elektrisen (lampu/penerangan)	1 orang
10	Oiler (juru minyak)	3 orang
11	Koki	1 orang

2. Data Pekerja Kapal Motor Penumpang Sardinela (KMP. Sardibela).

No	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	Nahkoda	1 orang
2	Mualim	2 orang
3	KKM (kepalah kamar mesin)	1 orang
4	Masinis	1 orang
5	Mandor	1 orang
6	Serang	1 orang
7	Juru mudi	3 orang
8	Juru minyak	3 orang
9	Juru listrik	1 orang
10	Pelayan	1 orang
11	Juru masak	1 orang
12	Kelasi	3 orang

Hal ini sangat merugikan pihak anak buah kapal, dikarenakan dengan tidak terpenuhi hak-hak anak buah kapal, maka mereka tidak dapat memenuhi akan kebutuhan hidupnya beserta keluarganya. Berkaca dari apa yang dialami para anak buah kapal, yang bekerja pada perusahaan milik daerah Maluku Tenggara Barat ini, sungguh dibutuhkan perlindungan hukum bagi anak buah kapal terkait hak-hak yang patut mereka dapatkan. Dari latar belakang permasalahan ini penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK BUAH KAPAL(ABK) PADA PT.KALWEDO KIDABELA MALUKU TENGGARA BARAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat?
2. Apa faktor-faktor yang menyebabkan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat tidak terpenuhi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan anak buah kapal untuk menuntut perlindungan hukum atas hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi?

1.3.Tujuan Penelitian

Dalam penelitiann ini memiliki tujuan yaitu:

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat tidak terpenuhi
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan anak buah kapal untuk menuntut perlindungan hukum atas hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi.

1.4.Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian maka manfaat penulisan terdiri atas dua bagian yakni:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan berguna dalam memperkaya literatur serta penelitian dalam bidang hukum, khususnya hukum ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh atas hak-hak dasar terlebih khusus hak-hak anak buah kapal.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai penerapan teori terkait hukum ketenagakerjaan yang pernah dipelajari di bangku perkuliahan, sangat bermanfaat untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi di lapangan serta mampu memecahkan masalah dan memberikan solusi terhadap hubungan hukum antara pekerja dan pihak kapal/pengelola kapal dan cara mendapatkan hak-hak pekerja melalui undang-undang yang ada.

b. Bagi pekerja/buruh anak buah kapal

Hasil penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pekerja/buruh anak buah kapal, dalam pemahamannya mengenai perlindungan hukum atas hak-hak pekerja/buruh dan dapat digunakan sebagai suatu pemecahan masalah, untuk membantu mereka mengetahui upaya-upaya apa yang dilakukan untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

c. Bagi PT.Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak perusahaan dalam melaksanakan atau menerapkan hak-hak pekerja anak buah kapal yang sudah semestinya diperoleh dan menjadi tanggung jawab perusahaan.

d. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang bertugas di bidang ketenagakerjaan untuk lebih memperhatikan lagi nasib pekerja/buruh atas hak-haknya khususnya hak-hak anak buah kapal yang harus dilindungi.

1.5. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian *yuridis empiris* yaitu penelitian terhadap perilaku masyarakat dengan cara studi kasus, dimana penelitian dilaksanakan dengan penelitian lapangan sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat yang beralamat di pelabuhan penyeberangan Saumlaki.

1.5.3. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini terdiri dari dua data yakni data primer dan data sekunder.

1.5.3.1. Data Primer

Untuk memudahkan penelitian, maka diambil data melalui sumber data primer yakni sumber data utama yang didapat langsung dari penelitian di lapangan, yaitu melakukan penelitian langsung pada PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat terkait dengan objek penelitian ini. Data diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan ABK yang bekerja di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat serta wawancara langsung dengan direktur utama PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat.

1.4.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap atau pendukung yang terdiri dari perjanjian kerja laut antara anak buah kapal (ABK) dan PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat, peraturan perundang-undangan, serta buku-buku dan artikel.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap anak buah kapal selaku pekerja dan pihak yang berwenang yakni perusahaan, serta melakukan studi lapangan tentang dokumen atau berkas yang terkait topik yang sedang diteliti.

1.5.5. Analisis Data

Metode analisis data yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah metode penulisan kualitatif, yakni data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian yang disusun dalam suatu karya ilmiah, karena dalam penelitian hukum ini data yang terkumpul sulit diukur dengan angka, sebab data dikumpulkan dari wawancara dan observasi terkait perjanjian kerja laut. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri dari data yang harus dianalisis dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan *deskriptif-analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dalam penelitian ini.²

1.6. Sitematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang penulisan skripsi ini penulis menggunakan sistem penulisan yang terdiri dari 4 bab yaitu pendahuluan, kajian pustaka, pembahasan dan penutup serta lampiran-lampiran daftar pustaka yang disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Metode penelitian, meliputi jenis

² Ronny Hanitijio Soemotro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1995, hlm 12.

penelitian yang dipakai yaitu penelitian empiris yang dilakukan dengan cara studi kasus, yaitu peneliti memfokuskan penelitiannya pada permasalahan hukum yang terjadi. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tinjauan pustaka tentang konsep, asas, teori perlindungan hukum, teori keadilan dan kepastian hukum, pengertian pekerja dan anak buah kapal, pengusaha dan tanggung jawab pengusaha, perjanjian kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja waktu tidak tertentu, perjanjian kerja laut serta upaya penyelesaian sengketa perburuhan.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil penelitian penulis saat melakukan wawancara dan observasi terkait perjanjian kerja laut dan membahas mengenai bagaimana pemenuhan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat dan faktor-faktor yang menyebabkan hak-hak anak buah kapal di PT. Kalwedo Kidabela Maluku Tenggara Barat tidak terpenuhi serta membahas upaya yang dilakukan anak buah kapal untuk menuntut perlindungan hukum atas hak-hak pekerja yang tidak terpenuhi.

BAB IV Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dari uraian-uraian pada bab sebelumnya dan saran-saran yang membangun dari penulis berhubungan dengan permasalahan yang dibahas